

**LAPORAN KEUANGAN
KANTOR CAMAT BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat karunianya sehingga dapat kami selesaikan Laporan Keuangan **KANTOR CAMAT BATUKLIANG** Tahun Anggaran 2024. Laporan Keuangan ini memuat segala transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh **KANTOR CAMAT BATUKLIANG** dalam jangka waktu satu tahun, juga memuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel, disamping itu Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Akhir kata, kami sadari bahwa laporan keuangan ini belumlah sempurna, sehingga kami mohon saran dan masukan, demi kemajuan dan perkembangan OPD kami.

CAMAT BATUKLIANG

LALU SUDIRMAN, S.Si, MM
NIP.196912311990013049

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN.....	
BAB I LAPORAN KEUANGAN KANTOR CAMAT BATUKLIANG	
1.1. Face Laporan Realisasi Anggaran.....	
1.2. Face Laporan Operasional	
1.3. Face Neraca.	
1.4. Face Laporan Perubahan Ekuitas	
BAB II CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
2.1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	
2.2. Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan	
2.3. Basis Pengukuran	
2.4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
3.1.Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	
3.2.Pos-Pos Laporan Operasional	
3.3. Pos-Pos Neraca	
3.4.Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR LAMPIRAN

<i>SP2D KEKURANGAN GAJI</i>	
<i>SP2D TPP DESEMBER 2024</i>	
<i>BERITA ACARA STOCKOPNAME KAS</i>	
<i>BERITA ACARA REGOSTER PENUTUPAN KAS</i>	
<i>BERITA ACARA STVKOPNAME BARANG HABIS PAKAI</i>	
<i>BERITA ACARA REKON ASET</i>	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester 2 TA 2024 Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Neraca, Laporan LPE dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Matang, 31 Desember 2024

Camat Batukliang

Lalu Sudirman, S.Si,MM
NIP. 196912311990031049

BAB I
LAPORAN KEUANGAN
KANTOR CAMAT BATUKLIANG

1.1. Face Laporan Realisasi Anggaran



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT BATUKLIANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00		262,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00		262,00
4.1.01	Pajak Daerah	0,00	0,00		0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00		0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00		0,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	0,00		0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	0,00	0,00		0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00		0,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	0,00	0,00		0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	0,00	0,00		0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00		0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00		0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	0,00		0,00

4.1.01 .16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00		0,00
4.1.01 .19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(J),PBJT].	0,00	0,00		0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	0,00		0,00
4.1.02 .01	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00		0,00
4.1.02 .02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00		0,00
4.1.02 .03	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00		0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00		262,00
4.1.04 .08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00		0,00
4.1.04 .09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00		262,00
4.1.04 .11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00		0,00
4.1.04 .12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00		0,00
4.1.04 .13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00		0,00
4.1.04 .15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00		0,00
4.1.04 .16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00		0,00
4.1.04 .18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00		262,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00		0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00		0,00
4.3.01 .01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00		0,00
4.3.01 .05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00		0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00		0,00

4.3.03 .02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00		262,00
5	BELANJA DAERAH	2.188.985.067,00	2.174.366.085,00	99,34	2.283.447.708,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.121.009.992,00	2.107.116.085,00	99,24	1.934.411.347,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.383.420.688,00	1.372.857.380,00	99,24	1.292.014.774,00
5.1.01 .01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	880.086.688,00	875.733.454,00	99,51	855.020.821,00
5.1.01 .02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	500.100.000,00	493.889.926,00	98,76	433.759.953,00
5.1.01 .03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.234.000,00	3.234.000,00	100,00	3.234.000,00
5.1.01 .04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00		0,00
5.1.01 .05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00		0,00
5.1.01 .06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00		0,00
5.1.01 .88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00		0,00
5.1.01 .99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00		0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	737.589.304,00	734.258.705,00	99,55	642.396.573,00
5.1.02 .01	Belanja Barang	530.132.590,00	529.498.200,00	99,88	398.119.206,00
5.1.02 .02	Belanja Jasa	138.128.714,00	136.660.765,00	98,94	135.935.287,00
5.1.02 .03	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	44.152.160,00
5.1.02 .04	Belanja Perjalanan Dinas	34.628.000,00	33.399.740,00	96,45	19.439.920,00
5.1.02 .05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.200.000,00	31.200.000,00		44.750.000,00
5.1.02 .88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00		0,00
5.1.02 .99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00		0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00		0,00
5.1.05 .01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00		0,00

5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00		0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00		0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00		0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00		0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.121.009.992,00	2.107.116.085,00	99,24	1.934.411.347,00
5.2	BELANJA MODAL	67.975.075,00	67.250.000,00	99,51	349.036.361,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.975.075,00	67.250.000,00	98,76	343.821.765,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00		0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00		245.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00		0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	4.540.550,00	4.500.000,00	99,11	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	29.045.435,00	28.910.000,00	99,53	87.081.200,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00		0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00		0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00		0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	34.389.090,00	33.840.000,00	98,94	11.740.565,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00		0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00		0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00		0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00		0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00		0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00		0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	0,00		0,00

5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00		0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00		0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00		0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00		0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00		0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00		0,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00		0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00		0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00		0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00		0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00		5.214.596,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00		0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah raga	0,00	0,00		5.214.596,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00		0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00		0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00		0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	67.975.075,00	67.250.000,00	98,94	349.036.361,00
	JUMLAH BELANJA	2.188.985.067,00	2.174.366.085,00	99,33	2.283.447.708,00
	SURPLUS/DEFISIT	-2.188.985.067,00	-2.174.366.085,00		-2.283.447.446,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00		0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00		0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00		0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00		0,00

	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00		0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00		0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-2.188.985.067,00	-2.174.366.085,00	99,33	-2.283.447.446,00

CAMAT BATUKLIANG

LALU SUDIRMAN,S.Si,MM
NIP.196912311990031049

1.2. Face Laporan Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT BATUKLIANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN				RE F	TAHUN 2024	TAHU N 2023	KENAI KAN/ PENU RUNA N	%
KEGIATAN OPERASIONAL				5.4				
PENDAPATAN DAERAH - LO				5.4.1	-	262,00	(262,00)	(100,00)
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO				5.4.1.1	-	262,00	- 262,00	(100,00)
Pajak Daerah - LO				5.4.1.1.1	-		-	
Retribusi Daerah - LO				5.4.1.1.2	-		-	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO				5.4.1.1.3	-		-	
Lain-lain PAD Yang Sah - LO				5.4.1.1.4	-	262,00	(262,00)	(100,00)
PENDAPATAN TRANSFER - LO				5.4.1.2	-	-	-	
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN LO				5.4.1.2.1	-	-	-	

		Dana Bagi Hasil - LO			5.4. 1.2. 1.1	-		-	
		Dana Alokasi Umum - LO			5.4. 1.2. 1.2	-		-	
		Dana Alokasi Khusus-Fisik - LO			5.4. 1.2. 1.3	-		-	
		Dana Alokasi Khusus- Non Fisik - LO			5.4. 1.2. 1.4	-		-	
		TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO			5.4. 1.2. 2	-	-	-	
		Dana Insentif Daerah (DID) - LO			5.4. 1.2. 2.1	-		-	
		Dana Desa - LO			5.4. 1.2. 2.2	-	-	-	
		TRANSFER ANTAR DAERAH - LO			5.4. 1.2. 3	-	-	-	
		Pendapatan Bagi Hasil - LO			5.4. 1.2. 3.1	-		-	
		Bantuan Keuangan - LO			5.4. 1.2. 3.2	-		-	
	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				5.4. 1.3	-	-	-	
		Pendapatan Hibah - LO			5.4. 1.3. 1	-		-	
		Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan - LO			5.4. 1.3. 2	-		-	
BEBAN DAERAH					5.4. 2	2.113.42 7.475,00	2.069.59 3.517,00	43.833. 958,00	2,12
	BEBAN OPERASI				5.4. 2.1	2.113.42 7.475,00	2.069.59 3.517,00	43.833. 958,00	2,12
		Beban Pegawai			5.4. 2.1. 1	1.379.16 8.770,00	1.285.86 6.059,00	93.302. 711,00	7,26
		Beban Barang dan Jasa			5.4. 2.1. 2	734.258. 705,00	642.396. 573,00	91.862. 132,00	14,3 0

		Beban Bunga			5.4. 2.2	-		-	
		Beban Subsidi			5.4. 2.3			-	
		Beban Hibah			5.4. 2.4	-		-	
		Beban Bantuan Sosial			5.4. 2.5	-		-	
		Beban Penyisihan Piutang			5.4. 2.6	-		-	
		Beban Penyusutan dan Amortisasi			5.4. 2.7	-	141.330.885,00	(141.330.885,00)	(100,00)
	BEBAN TRANSFER				5.4. 2.8	-	-	-	
		Beban Bagi Hasil			5.4. 2.8. 1	-		-	
		Beban Bantuan Keuangan			5.4. 2.8. 2	-		-	
	BEBAN TAK TERDUGA				5.4. 2.9	-	-	-	
		Beban tak terduga			5.4. 2.9. 1	-	-	-	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL					5.4. 3	(2.113.427.475,00)	-2.069.593.255,00	(43.834.220,00)	2,12
KEGIATAN NON OPEASIONAL					5.4. 4				
	SURPLUS NON OPERASIONAL				5.4. 4.1	-	-	-	
		Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO			5.4. 4.1		-		
		Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			5.4. 4.1	-		-	
	DEFISIT NON OPERASIONAL				5.4. 4.2	-	-	-	
		Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO			5.4. 4.2		-		
		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			5.4. 4.2	-		-	

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON - OPERASIONAL					-	-	-		
POS LUAR BIASA				5.4.5					
		Pendapatan Luar Biasa		5.4.5					
		Beban Luar Biasa		5.4.5	-		-		
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA					5.4.6	-	-	-	
SURPLUS/DEFISIT LO					5.4.7	(2.113.427.475,00)	-2.069.593.255,00	(43.834.220,00)	2,12

CAMAT BATUKLIANG

LALU SUDIRMAN, S.Si, MM
NIP.196912311990031049

1.3. Face Neraca

**PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK
TENGAH**



**Kantor Camat Batukliang
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 30 Juni 2024**

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	6.377.627.609,00	6.219.041.031,00
1.1	ASET LANCAR	104.346.578,00	0,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(1.102.283.345,00)	0,00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(1.206.629.923,00)	0,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	104.346.578,00	0,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1.206.629.923,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	1.206.629.923,00	0,00

	JUMLAH ASET LANCAR	104.346.578,00	0,00
		0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	6.273.281.031,00	6.219.041.031,00
1.3.01	Tanah	5.221.200.000,00	5.221.200.000,00
1.3.01.01	Tanah	5.221.200.000,00	5.221.200.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.077.139.015,00	1.022.899.015,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	387.846.550,00	387.846.550,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	4.500.000,00	0,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	404.105.300,00	388.205.300,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.000.000,00	12.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	193.767.165,00	159.927.165,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	67.500.000,00	67.500.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	7.420.000,00	7.420.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.331.330.600,00	1.331.330.600,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	1.174.830.600,00	1.174.830.600,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	156.500.000,00	156.500.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.687.500,00	9.687.500,00
1.3.04.03	Instalasi	7.187.500,00	7.187.500,00
1.3.04.04	Jaringan	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	6.609.596,00	6.609.596,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	45.000,00	45.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	6.564.596,00	6.564.596,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.372.685.680,00)	(1.372.685.680,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(588.471.774,00)	(588.471.774,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(776.172.236,00)	(776.172.236,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(8.041.670,00)	(8.041.670,00)
	JUMLAH ASET TETAP	6.273.281.031,00	6.219.041.031,00

		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	6.377.627.609,00	6.219.041.031,00
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	38.353.595,00	32.654.654,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38.353.595,00	32.654.654,00
2.1.06	Utang Belanja	38.353.595,00	32.654.654,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	38.353.595,00	32.654.654,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38.353.595,00	32.654.654,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	38.353.595,00	32.654.654,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	6.339.274.014,00	6.186.386.377,00
3.1	EKUITAS	6.339.274.014,00	6.186.386.377,00
3.1.01	Ekuitas	5.132.644.091,00	3.902.938.931,00
3.1.01.01	Ekuitas	6.186.386.377,00	5.972.532.186,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(1.053.742.286,00)	(2.069.593.255,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	1.206.629.923,00	2.283.447.446,00
3.1.03.01	RK PPKD	1.206.629.923,00	2.283.447.446,00
	JUMLAH EKUITAS	6.339.274.014,00	6.186.386.377,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.377.627.609,00	6.219.041.031,00

CAMAT BATUKLIANG

LALU SUDIRMAN,S.Si,MM
NIP.196912311990031049

1.4. Face LPE



Pemerintah Kab. Lombok Tengah Kantor Camat Batukliang
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 30 JUNI 2024

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	6.186.386.377,00	5.972.532.186,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(1.053.742.286,00)	(2.069.593.255,00)
RK PPKD	1.206.629.923,00	2.283.447.446,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	6.339.274.014,00	6.186.386.377,00

CAMAT BATUKLIANG

LALU SUDIRMAN,S.Si,MM

BAB II CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2.1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Asumsi Kemandirian entitas, berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan .
- b. Asumsi kesinambungan entitas, berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
- c. Asumsi keterukuran, berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

2.2. Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah adalah basis kas menuju akrual (cash towards accrual), dimana basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa

- a. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

2.3. Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

2.4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

1) Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

2) Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

c) Belanja Lain-lain/Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

B. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net aset).

1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara

Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.

d) Piutang Pajak

yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan pajak (SKP-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang belum dilunasi.

e) Piutang Retribusi

yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.

f) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

g) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

h) Persediaan

adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen

(1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara

dan/atau investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%, antara 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

(2) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat.

Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya

dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

(2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

(3) Jalan, Irigasi dan Jembatan

Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

(4) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus diayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan dan pembayaran kalim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.

(2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

(2) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui

Pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

(3) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah (aset tetap yang kondisinya rusak berat) dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

3) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar kembalidalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiaannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka -pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke dalam bagian lancar utang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(3) Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPH)

Utang Pemotongan Pajak Pusat merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPH yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa.

(4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

- **Ekuitas dana lancar**

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang bersifat lancar.

- **Ekuitas Dana Investasi**

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

- **Ekuitas Dana Cadang**

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundangan.

3) Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

4) Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima/dikeluarkan.

Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan ketentuan dalam SAP yakni seluruh aset tetap yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 53, dimana *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi)*.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Belanja

Dari Anggaran Belanja Kantor Camat Batukliang yang tertuang dalam APBD 2024 sebesar **Rp 2.188.985.067** dengan realisasi mencapai **Rp2.174.366.085** atau **99.33 %** Per 31 Desember 2024. Adapun perincian dari realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut :

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	2.121.009.992,00	2.107.116.085,00	99,24
2	Belanja Modal	67.975.075,00	67.250.000,00	98,94
	Jumlah	2.188.985.067,00	2.174.366.085,00	99,33

a). Belanja Operasional

Realisasi belanja operasional per 30 Juni 2024 sebesar Rp 1.048.043.345 atau 50.84% dari anggaran sebesar Rp2.061.397.171 Realisasi belanja operasional digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	1.323.807.867	764.911.237	57,78
2	Belanja Barang dan Jasa	737.589.304	283.132.108	38,39
	Jumlah	2.061.397.171	1.048.043.345	50,84

b). Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2024 sebesar Rp54.240.000 atau 79.79 % dari anggaran sebesar Rp. 67.975.075 . Dari 2 Jenis belanja sebagai berikut

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin	67.975.075	54.240.000	79,79
	Jumlah	67.975.075	54.240.000	79,79

3.2.POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Kantor Camat Batukliang Per 30 Juni 2024.

1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan Per 30 Juni 2024 direalisasikan senilai Rp.0,00

2. BEBAN

Beban Kantor Camat Batukliang untuk periode 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 1.053.742.289 dengan rincian sebagai berikut.

a. Beban Operasi

Beban Operasi Per 30 Juni 2024 merupakan beban yang ditanggung oleh SKPD dalam hal ini Kantor Camat Batukliang selama satu tahun Anggaran dengan perincian sebagai berikut.

No.	Jenis Beban	2024	2023
1	Beban Pegawai	770.610.178	1.285.866.059,00
2	Beban Barang dan Jasa	283.132.108,00	642.396.573,00
	Jumlah	1.053.742.286,00	1.928.262.632

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Dari Pendapatan dan Beban Operasional diatas, diketahui Surplus/(Defisit) Operasional Per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp(874.520.346) yang didapatkan dari jumlah realisasi tahun 2024 dikurangi realisasi tahun 2023.

3.3.POS-POS NERACA

1) Aset

- **Aset Lancar**

Berikut rincian jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo per 30-06-2024 (Rp)	Saldo per 31-12-2023(Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp104.346.578	0
Jumlah		Rp104.346.578	0

- **Aset Tetap**

Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari :

No	Uraian	Saldo	
		Per 30-06-2024	Per 31-12-2023
1	Tanah	5.221.200.000,00	5.221.200.000
2	Peralatan dan Mesin	1.122.139.015,00	1.067.899.015
3	Gedung dan Bangunan	1.331.330.600,00	1.331.330.600
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.687.500,00	9.687.500
5	Aset Tetap Lainnya	6.609.596,00	6.609.596
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(1.417.685.680,00)	(1.417.685.680,00)
	JUMLAH ASET TETAP	6.273.281.031,00	6.219.041.031

Jumlah aset tetap pada 31 Desember 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 mengalami penambahan dari keadaan tahun sebelumnya. Penambahan ini terjadi karena terdapat mutasi penambahan Peralatan Dan Mesin, Sedangkan untuk Gedung dan Bangunan, jalan Irigasi dan jembatan dan Aset tetap lainnya pada periode 30 Juni 2024 tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

3.4.POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan kenaikan atau penurunan ekuitas per 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal senilai Rp. 6.186.386.377 Ekuitas awal merupakan ekuitas akhir tahun 2023.

2. Surplus/(Defisit)-Laporan Operasional (LO)

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	(1.053.742.286)
	Jumlah	(1..053.742.286)

3.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Merupakan koreksi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya berupa koreksi saldo awal aset tetap tahun sebelumnya ditambah dengan pengadaan barang extracomtable tahun berjalan.

Dalam hal ini sampai dengan 30 Juni 2024 belum terdapat koreksi saldo atas ekuitas tahun sebelumnya.

4. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp6.339.274.014

BAB IV PENUTUP

Demikian Catatan Atal laporan Keuangan SKPD (CALK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan.

Mantang, 31 Agustus 2024

Camat Batukliang



Lalu Sudirman, S.Si, MM
Nip. 19612311990031049

LAMPIRAN-LAMPIRAN